

Perkembangan di Asia Selatan Tahun 1986

Endi RUKMO*

Perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Selatan selama tahun 1986 berkisar tidak saja pada perkembangan di dalam negeri seperti bentrokan antar-etnis hampir di semua negara di kawasan ini, tetapi juga pada bidang luar negeri, baik perkembangan hubungan antar-negara di kawasan seperti SAARC, maupun antara mereka dan negara-negara besar dari luar kawasan.

SAARC

SAARC (South Asian Association for Regional Corporation) dibentuk tanggal 7 Desember 1985 di Dhaka, dan beranggotakan tujuh negara Asia Selatan (Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka). Organisasi ini bertujuan meningkatkan kerjasama regional yang meliputi bidang-bidang pertanian, telekomunikasi, meteorologi, penerbangan sipil, kebudayaan dan pendidikan.

Sejak awal organisasi ini sepakat untuk: (1) melarang semua bentuk pembicaraan bilateral mengenai masalah yang sedang disengketakan; (2) mencapai keputusan secara aklamasi. Jadi setiap anggota memiliki hak veto. Ditilik dari latar belakang hubungan antar-negara di kawasan ini, pencantuman masalah-masalah bilateral akan segera mengakibatkan kesulitan-kesulitan besar. Permasalahan antara India dan negara-negara tetangganya adalah mulai dari soal perbatasan sampai pada pelarian politik dan kegiatan subversif, pengembangan senjata nuklir, perdagangan dan penyelundupan serta pemanfaatan air sungai yang mengalir melewati beberapa negara.

Di samping permasalahan tersebut, masih terdapat faktor psikologis yang dapat pula menjadi sumber perpecahan. Faktor ini adalah kecurigaan terha-

*Staf CSIS.

dap India yang merupakan negara terluas di kawasan ini (menguasai 73% wilayah), mempunyai penduduk terbesar (77%), menguasai 78% GDP dan mempunyai angkatan bersenjata terkuat keempat di dunia. Sebaliknya India juga merasa resah dan curiga bukan terhadap salah satu negara tetangga, tetapi terhadap persekongkolan di antara negara tetangga untuk melawan India. Di samping itu kecemasan India juga muncul karena adanya pengaturan kerjasama keamanan antara salah satu negara di kawasan dan negara besar di luar kawasan yang salah satu tujuannya adalah menghadapi ancaman India.

Karena faktor tersebut muncul isu-isu yang mengatakan bahwa India berusaha mendominasi SAARC. Tetapi isu-isu tersebut segera dibantah oleh Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi, yang mengatakan bahwa: (1) India tidak akan pernah mendominasi SAARC; (2) setiap anggota mempunyai kedudukan dan hak yang sama; (3) negara anggota SAARC perlu membangun kepercayaan untuk menghilangkan kesalahpahaman.¹

Persoalan di atas terus menghantui kelangsungan hidup SAARC. Bahkan KTT SAARC-II yang diadakan di Bangalore, India, pertengahan November 1986, tetap dibayangi oleh persengketaan bilateral yang terjadi baik antara India dan Pakistan maupun India dan Sri Lanka. Memang dalam pertemuan puncak itu sendiri masalah-masalah bilateral tidak boleh dibahas, tetapi kesempatan itu rupanya dimanfaatkan oleh setiap pihak untuk mengadakan pendekatan-pendekatan bilateral juga, seperti pertemuan terpisah antara Rajiv Gandhi dan PM Pakistan, Mohammad Khan Junejo, serta antara Rajiv Gandhi dan PM Sri Lanka, Jayewardene.

Meskipun demikian, KTT berhasil mengeluarkan sebuah komunike bersama yang antara lain menyatakan bahwa mereka sepakat untuk: (1) membuka sekretariat bersama yang permanen di Kathmandu, Ibukota Nepal, dengan Sekretaris Jenderal Pertama Abul Ahsan, seorang diplomat kawakan Bangladesh; (2) meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan industri dan mengusahakan suatu investasi multilateral untuk memproses komoditi pertanian; (3) menyatukan strategi dalam menghadapi permasalahan ekonomi global di forum-forum internasional; (4) membentuk satu komite bersama untuk menanggulangi masalah narkotik; (5) mengecam terorisme. Dari kelima hasil konperensi tersebut yang paling konkret adalah hasil pertama, yaitu pembentukan sekretariat permanen. Yang lain masih harus dicarikan cara-cara untuk mencapainya. Yang paling mengambang adalah kecaman terhadap terorisme, karena belum terdapat suatu definisi yang seragam mengenai terorisme sendiri. Untuk ini telah dibentuk satu komite guna membuat formulasi mengenai hal itu dan kemudian akan diajukan pada Pertemuan SAARC Tingkat Menteri Luar Negeri pada pertengahan tahun 1987.²

¹Antara, 10 Desember 1985.

²Far Eastern Economic Review, 27 November 1986.

Usaha meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan industri tampaknya masih menghadapi banyak rintangan. Seperti halnya perekonomian ASEAN, perekonomian negara-negara SAARC lebih bersifat kompetitif daripada komplementer. Jika ASEAN yang sudah berumur 19 tahun belum mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada, kiranya lebih sulit bagi SAARC yang baru menginjak usia dua tahun itu untuk meningkatkan kerjasama ekonomi seperti yang dicita-citakan, terlebih-lebih karena hantu persengketaan bilateral terus membayangi mereka.

MASALAH ETNIK

Masalah etnik merupakan masalah pelik yang sejak lama dihadapi India. Yang paling menonjol adalah usaha pemisahan kaum Sikh yang telah berlangsung lebih dari lima tahun. Masalah ini memuncak ketika pasukan India menyerbu tempat ibadah warga Sikh, Kuil Emas, di Amritsar pada bulan Juni 1984. Beberapa bulan kemudian, dalam bulan Agustus 1984, PM Ny. Indira Gandhi tewas ditembak oleh pengawalnya sendiri yang berasal dari kelompok Sikh. Oleh penggantinya, PM Rajiv Gandhi, masalah ini telah diusahakan untuk diselesaikan dengan diumumkannya suatu pernyataan bersama dengan kelompok Sikh moderat pada bulan Juli 1985.

Meskipun demikian usaha yang dilakukan oleh kelompok moderat itu rupanya tidak dihiraukan oleh kelompok Sikh Ekstrem. Mereka ini terus melakukan sabotase dengan membunuh beberapa pejabat tinggi, melakukan pemboman dan penembakan massal terhadap warga Hindu. Bahkan sekali lagi mereka berhasil menduduki Kuil Emas. Untuk itu PM Gandhi mendesak agar Pemerintah Sikh Moderat di Punjab berusaha mengatasi kemelut tersebut, dan mengancam akan kembali mengirimkan pasukan bila usaha itu tidak berhasil.

Ancaman itu menjadi kenyataan ketika pasukan pemerintah menyerbu untuk kedua kalinya ke Kuil Emas akhir Januari 1986. Setelah penyerbuan itu Gandhi menyatakan bahwa serangan itu dilakukan karena Pemerintah India tidak ingin membiarkan fanatisme berkembang di wilayah mana pun di negeri itu. Akibat serangan itu tiga menteri negara bagian Punjab, delapan pemimpin Partai Sikh, Akali Dal, dan empat anggota Partai Akali Dal di Parlemen mengundurkan diri. Mereka ini menuduh kelompok moderat Sikh bekerjasama dengan Pemerintah New Delhi guna membasmi warga Sikh.

Sekali lagi persetujuan dicapai antara Pemerintah Federal (New Delhi) dan Pemerintah Punjab yang ditandatangani oleh PM Gandhi dan Ketua Partai Akali Dal, Harehand Singh, pada bulan Juli 1986. Tetapi rupanya persetujuan

ini pun tidak digubris oleh kelompok ekstrem Sikh dan tindak terorisme tetap berlangsung hingga akhir bulan November 1986 dengan korban terakhir belasan warga Hindu tewas dibantai dalam perjalanan mereka. Akibat kejadian terakhir ini tampaknya kesabaran warga Hindu sudah habis. Sejak awal Desember 1986 mereka mulai mengadakan demonstrasi besar-besaran tidak saja di New Delhi, tetapi juga di negara-negara bagian lain untuk menentang kaum Sikh.

Permasalahan etnis lain yang dihadapi Pemerintah India adalah suku Gurkha dengan Front Pembebasan Nasionalnya (GNLF). Seperti halnya kaum Sikh, mereka ini juga melancarkan kampanye untuk mendirikan negara terpisah dari New Delhi. Mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua karena pemerintah pusat kurang memberikan perhatian di dalam pembangunan wilayah Gurkha.³

Selain masalah-masalah etnis, India juga menghadapi masalah agama dan bahasa. Kerusakan yang cukup besar telah terjadi hampir di seluruh India awal bulan Desember 1986. Sumber kerusakan itu adalah sebuah cerita di Harian *Deccan Herald* yang berjudul "Si Tolol Muhammad." Cerita ini dianggap menghina Nabi, sehingga mengundang reaksi dari umat Islam mulai dari Tunkur, 60 km sebelah barat Bangalore, sampai akhirnya meluas di seluruh wilayah India. Kerusakan timbul di mana-mana mengakibatkan 16 orang tewas dan sekurang-kurangnya 700 orang ditahan. Kerusakan lain telah terjadi pula di negara bagian Tamil Nadu, ketika warga Tamil berdemonstrasi menentang penggunaan bahasa Hindu sebagai bahasa nasional. Untuk mencegah agar kerusakan itu tidak meluas, polisi telah menahan sekurang-kurangnya 5.000 orang.

Dari kerusakan-kerusakan di atas, tampak betapa beratnya beban yang ditanggung oleh Pemerintah Rajiv dewasa ini. Masalah-masalah inilah yang sangat menghambat pembangunan ekonomi negeri itu. Untuk mengatasinya, Pemerintah New Delhi harus memeras tenaga dan dana yang besar.

Meskipun tidak begitu parah, Pakistan juga sedang menghadapi masalah yang sama dengan India. Sejak Presiden Zia Ul-Haq menghapuskan hukum darurat bulan Desember 1985, telah terjadi dua kali bentrokan antara kelompok Islam Shiah dan Islam Sunni di Propinsi Punjab (wilayah Pakistan). Ini bermula dari sabotase jalannya upacara keagamaan Shiah oleh kelompok Sunni yang merupakan mayoritas di negeri itu (Shiah hanya sekitar 15%). Untuk mengatasinya Pemerintah Pakistan segera memberlakukan jam malam dan larangan ke luar rumah di kota Lahore, Sandah, Krishan Nagar, Mughalpura, Baghbanpura, Garhi Shahu dan Dharampura. Di samping itu

³*Kompas*, 2 Agustus 1986.

pada awal Desember 1986 juga terjadi perang suku antara suku Pathan dan Mujahir di Karachi yang mengakibatkan 70 orang tewas.

Seperti halnya India, Sri Lanka sedang dilanda kerusuhan-kerusuhan rasial yang melibatkan Suku Tamil di Propinsi Utara dan Timur yang merupakan minoritas dan suku Sinhala yang merupakan mayoritas. Berawal dari perasaan dianaktirikan, Suku Tamil itu akhirnya menuntut untuk memisahkan diri dari Sri Lanka dan membentuk negara merdeka sendiri. Tuntutan itu ditentang oleh sebagian besar rakyat Sri Lanka. Presiden Jayewardene pernah menyatakan bahwa Pemerintah Kolombo hanya akan mempertimbangkan suatu otonomi saja. Jawaban pemerintah itu ditolak oleh kelompok ekstrem Tamil yang menamakan dirinya sebagai Front Pembebasan Tamil dan Organisasi Pembebasan Rakyat Tamil.

Kerusuhan-kerusuhan semakin sering terjadi sejak terbunuhnya seorang mayor dari Suku Tamil yang juga seorang anggota parlemen pada tahun 1976. Sejak itu ratusan penduduk sipil yang tidak berdosa dan para petugas keamanan menjadi korban balas dendam. Bunuh-membunuh itu terus berlangsung antara Suku Tamil dan Suku Sinhala, dan memuncak pada bulan Juli 1983 ketika orang-orang Sinhala menyerang desa-desa Tamil di sekitar Kota Kolombo dan kota-kota lain di Sri Lanka.

Masalah Tamil ini mengundang campur tangan India, yang dituduh mengizinkan gerilyawan Tamil menggunakan wilayahnya sebagai basis utama. Pada mulanya Pemerintah Sri Lanka tidak menghendaki campur tangan asing atas masalah Tamil tersebut, yang dianggapnya sebagai masalah dalam negeri. Tetapi uluran tangan India akhirnya diterima dan bahkan pada KTT II SAARC (November 1986) India berhasil mempertemukan wakil-wakil dari Pemerintah Kolombo dan Suku Tamil.

Sampai saat ini masalah Tamil itu belum juga terselesaikan. Bahkan masalahnya semakin rumit, karena tidak saja melibatkan warga Sinhala, tetapi juga warga Islam yang juga mendapat serangan dari warga Tamil, dan perang antara warga Tamil sendiri.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI

Dari perkembangan pembangunan politik di negara-negara Asia Selatan, India merupakan satu-satunya negara yang sudah sejak lama mengembangkan sistem demokrasi yang dianggap cukup sukses. Dalam beberapa hal Sri Lanka juga sudah lebih maju daripada Pakistan atau Bangladesh. Meskipun sering terjadi kerusuhan-kerusuhan etnis, agama atau bahasa, bangsa India sudah lebih sadar akan sistem pergantian kepemimpinan yang demokratis.

Hal seperti itu tidak terjadi di Pakistan atau Bangladesh. Perkembangan demokrasi di Pakistan jauh berbeda dari India. Setelah Pakistan memisahkan diri dari India Inggris tanggal 14 Agustus 1947, selama sembilan tahun negara ini masih tetap di bawah dominion Inggris. Baru pada tanggal 23 Maret 1956 Pakistan merdeka sepenuhnya. Sejak itu telah terjadi tiga kali pengambilalihan kekuasaan secara militer. *Pertama*, ketika Jenderal Muhammad Ayub Khan mengadakan kudeta pada bulan Oktober 1958 dan memproklamasikan sistem presidensial sebagai pengganti sistem parlemen federal serta memberlakukan suatu konstitusi baru pada tahun 1962. *Kedua*, ketika Ayub digulingkan oleh Jenderal Yahya Khan pada bulan Maret 1969.

Yahya Khan berusaha menghidupkan sistem demokrasi. Untuk itu pada bulan Desember 1970 diselenggarakan pemilihan umum yang bebas untuk pertama kalinya. Dalam Pemilu ini Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto berhasil mendominasi pemilihan di Pakistan Barat, sementara Liga Awami yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman berhasil memenangkan pemilihan di Pakistan Timur. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Mujibur Rahman untuk memisahkan diri dari Pakistan dan memproklamasikan Republik Bangladesh pada tanggal 26 Maret 1971. Proklamasi itu ditentang oleh Bhutto dan Yahya dengan mengirimkan pasukan ke Bangladesh. Tetapi dengan bantuan India pasukan Pakistan itu dipaksa menyerah di Dhaka pada bulan Desember 1971. Di Pakistan sendiri kemudian Yahya menyerahkan kekuasaannya kepada Bhutto yang berhasil memenangkan Pemilu.

Pengambilalihan kekuasaan secara militer ketiga terjadi ketika Jenderal Zia-Ul Haq memaksa Bhutto turun pada tahun 1977. Ia dihukum mati karena tuduhan berkomplot membunuh lawan-lawan politiknya. Segera setelah berkuasa, Zia berjanji akan menghidupkan kembali sistem demokrasi dan akan segera menyerahkan kekuasaannya kepada sipil. Tetapi selama kekuasaannya itu dua Pemilu telah ditangguhkan dan bahkan pada tahun 1979 ia memberlakukan keadaan darurat yang baru dicabut pada bulan Desember 1985.

Setelah berhasil dikukuhkan sebagai presiden untuk lima tahun lagi pada referendum yang dilangsungkan pada akhir Desember 1984, Zia baru merealisasi janjinya untuk menyerahkan kekuasaannya secara bertahap kepada sipil. Pada tanggal 25 Februari 1985 suatu pemilihan Dewan Nasional diselenggarakan, tetapi tidak mengizinkan partai-partai politik ambil bagian. Calon-calon ditentukan oleh daerah. Meskipun diboikot oleh Gerakan Restorasi Demokrasi yang merupakan gabungan partai-partai politik Pakistan yang menentang pemerintah, pemilihan itu akhirnya berhasil memilih Dewan Nasional. Sesuai dengan amandemen konstitusi, dewan harus memilih seorang

perdana menteri. Pada tanggal 24 Maret 1985 dewan berhasil memilih perdana menteri sipil pertama, Muhammad Khan Junejo. Menurut Zia, pemilihan perdana menteri itu merupakan tahap awal pemerintahan sipil di Pakistan. Meskipun banyak tantangan Pemerintah Junejo ini berjalan lancar sampai saat ini.

Tahap berikutnya yang dilakukan Pemerintah Zia-Ul Haq adalah mencabut undang-undang darurat pada tanggal 30 Desember 1985. Dengan dicabutnya undang-undang itu, semua hak sipil diijinkan kembali termasuk pembentukan partai politik. Meskipun demikian perkembangan itu tidak ditanggapi secara positif oleh sebelas partai yang tergabung dalam Gerakan Restorasi Demokrasi (termasuk di dalamnya PPP). Mereka beranggapan bahwa usaha Zia itu tidak mencerminkan proses demokrasi. Dewan Nasional yang berhasil dipilih tidak mencerminkan wakil-wakil rakyat selama mereka itu bukan berasal dari partai-partai politik yang mempunyai kekuatan massa. Mereka juga menilai bahwa meskipun jabatan Perdana Menteri sudah diberikan kepada seorang sipil, Zia masih tetap menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Jadi sebenarnya kekuasaan Zia tidak berkurang. Dia tetap merupakan orang terkuat di Pakistan. Sedangkan Junejo hanyalah kaki tangan Zia.

Tuduhan kelompok oposisi itu belum tentu benar seluruhnya. Junejo ternyata berani menggeser teman-teman dekat Zia dari pemerintahan. Dia juga telah merintis pembentukan Liga Muslim Pakistan dalam usaha menghidupkan kembali partai-partai politik. Usaha Junejo itu didukung oleh sebagian besar anggota Dewan Nasional yang berfungsi seperti parlemen. Meskipun Zia tetap belum setuju partai politik masuk parlemen, dia membiarkan tindakan Junejo itu.⁴ Itu mengungkapkan bahwa Junejo mempunyai keinginan untuk bebas dari Zia.

Meskipun demikian Junejo masih tetap mengharapkan dukungan dari Zia terutama dalam menghadapi Gerakan Restorasi Demokrasi yang dalam tindakan-tindakan mereka menentang pemerintah cenderung menggunakan aksi-aksi kekerasan. Aksi-aksi yang dilakukan oleh pengikut Benazir Bhutto (PPP) pada bulan Agustus 1986 berubah menjadi kerusuhan massal. Di samping itu Junejo juga tetap menginginkan dukungan militer, karena sampai saat ini organisasi yang baik di dalam militer Pakistan merupakan salah satu modal untuk menarik dukungan rakyat. Selama ini Angkatan Bersenjata Pakistan sudah terbukti menawarkan hal-hal yang menarik dan menguntungkan rakyat.

Perkembangan politik di Pakistan itu tidak jauh berbeda dari perkembangan di Bangladesh. Setelah negara ini menjadi merdeka bulan Desember

⁴*Far Eastern Economic Review*, 6 Februari 1986, hal. 32.

1971, Mujibur Rahman memimpin sampai tanggal 15 Agustus 1975, ketika dia tewas terbunuh dalam suatu kudeta militer. Setelah itu terjadi counter-coup dan sebagai akibatnya Bangladesh diperintah oleh pemerintah darurat perang yang dipimpin oleh tiga orang. Mereka ini menunjuk A.M. Sayem sebagai presiden. Tetapi pada bulan April 1977 kepala pemerintah darurat perang, Jenderal Ziaur Rahman mengambil-alih jabatan itu. Pada bulan Februari 1979 suatu parlemen baru dibentuk dengan Partai Nasional Bangladesh yang dipimpin oleh Ziaur sebagai partai yang berkuasa. Tetapi nasib Ziaur sama dengan Mujibur. Dia ditembak oleh anak buahnya sendiri ketika berkunjung ke Pelabuhan Chittagong tanggal 30 Mei 1981. Penembaknya sendiri kemudian berhasil ditewaskan dan secara otomatis Wakil Presiden Abdus Sattar mengambil-alih jabatan Ziaur sampai dia dikup oleh Letjen H.M. Ershad pada tanggal 24 Maret 1982.

Sebagai pemimpin pemerintah darurat perang, Ershad mengangkat Ahsanuddin Chowdhury menjadi presiden. Tetapi pada tanggal 11 Desember 1983 jabatan itu diambil-alih olehnya.⁵ Sejak itu dia merupakan orang terkuat di negara yang berpenduduk 95 juta orang itu. Meskipun tampak berhasil dalam politik luar negerinya, terutama keaktifannya dalam pembentukan SAARC, ia tidak begitu berhasil dalam mengatasi politik di dalam negeri. Pada tahun 1985 ia membekukan semua kegiatan politik dan baru dicabut pada akhir tahun itu.

Tetapi pencabutan pembekuan itu bukanlah merupakan pencabutan undang-undang darurat. Undang-undang ini tetap dipertahankan sampai secara resmi dicabut pada tanggal 11 November 1986. Keadaan inilah yang ditentang oleh dua kelompok oposisi utama, yaitu Partai Nasional Bangladesh yang terdiri dari tujuh kelompok oposisi dan dipimpin oleh Begun Khaleda Zia, dan Liga Awami yang merupakan gabungan dari 15 partai dan dipimpin oleh Sheikh Hasina Wajed. Meskipun demikian pada pemilihan parlemen yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 1986, hanya Partai Nasional Bangladesh yang memboikot. Sedangkan Liga Awami tetap ikut ambil bagian dalam pemilihan itu dan memperoleh 70 kursi. Pemilihan itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh partai pemerintah, Partai Jatiya, yang memperoleh 134 kursi dari 268 kursi yang diperebutkan.

Berbeda dari pemilihan parlemen di atas, pemilihan umum untuk memilih presiden yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 1986, telah diboikot oleh kedua partai oposisi di atas. Alasan-alasan mereka antara lain: (1) dalam suasana undang-undang darurat tidak mungkin terjadi proses demokrasi yang murni; (2) pemilihan presiden itu hanyalah sandiwara karena sudah jelas Ershad akan memenangkan pemilihan itu. Oleh karena itu meskipun Ershad

⁵ *Asia 1986 Yearbook*, Far Eastern Economic Review, hal. 107.

berhasil mengumpulkan suara terbanyak dan karenanya memenangkan pemilihan, pihak oposisi tidak mau mengakuinya karena dinilai bukanlah pilihan rakyat yang sebenarnya. Dari 48 juta rakyat yang berhak memberikan suara, hanya 18 juta suara memberikan suaranya, sementara 30 juta lainnya memboikot.

Di sini tampak pengaruh oposisi di kalangan masyarakat cukup besar. Hal ini sangat membahayakan kedudukan Ershad. Kelompok oposisi akan tetap menuntut dia mengundurkan diri, lebih-lebih jika ia tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi kesulitan ekonomi yang parah sekarang ini.

HUBUNGAN ANTAR-NEGARA

Perkembangan yang menonjol di dalam hubungan antar-negara di kawasan Asia Selatan beberapa waktu belakangan ini terutama terjadi dengan munculnya inisiatif PM Rajiv Gandhi untuk memperbaiki hubungan India dengan negara-negara tetangganya. Sejak pengangkatannya dua tahun yang lalu, Rajiv telah banyak berusaha meningkatkan hubungan khususnya dengan Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh.

Hubungan antara India dan Pakistan merupakan hal yang paling menonjol di dalam hubungan antar-negara di kawasan itu, tidak saja karena sejarah pahit yang pernah dialami oleh bangsa yang pernah bersatu tersebut, tetapi juga karena Pakistan dewasa ini merupakan satu-satunya saingan India di kawasan. Oleh karenanya satu pihak selalu merasa tersaing atau terancam pihak lain. Masalah ini lebih dipanaskan oleh hadirnya kedua negara adikuasa yang mendukung salah satu pihak. Uni Soviet selalu mendukung India dan sebaliknya AS mendukung Pakistan. Sebenarnya masalah ini telah disadari oleh kedua negara, seperti terungkap dalam usul masing-masing. Pakistan pernah mengusulkan suatu pakta "non-war," sementara India mengusulkan suatu perjanjian persahabatan, kerjasama dan hubungan baik.

Salah satu usaha yang dilakukan adalah kunjungan Presiden Pakistan Zia-Ul Haq ke India tanggal 17 Desember 1985. Dalam pertemuannya dengan PM Gandhi suatu kesepakatan untuk meningkatkan hubungan bilateral telah dicapai. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang fasilitas-fasilitas nuklir masing-masing.⁶ Kunjungan tersebut juga membahas masalah Kashmir dan Jammu yang dipersengketakan sejak tahun 1947 ketika Pakistan menyerbu wilayah itu. Kedua negara berperang lagi untuk memperebutkannya pada tahun 1965. Sejak itu terus terjadi bentrokan-bentrokan kecil yang sering

⁶*Far Eastern Economic Review*, 2 Januari 1986, hal. 29.

menimbulkan korban. Pada bulan Maret 1986, misalnya, telah terjadi bentrokan bersenjata antara pasukan India dan Pakistan yang mengakibatkan sepuluh pasukan Pakistan tewas.⁷

Usaha perbaikan hubungan kedua negara itu rupanya tidak berjalan mulus. Di samping masalah Kashmir, hambatan lain yang terus membayangi usaha di atas adalah munculnya kecurigaan bahwa pihak yang satu mencampuri urusan pihak yang lain. Ketegangan diplomatik antara keduanya sempat meningkat pada bulan Februari 1986, ketika Pakistan dituduh oleh India membantu golongan Islam dalam aksi kekerasan antara warga Hindu dan Islam di wilayah India Utara.⁸ Di samping itu, India juga menuduh Pakistan terlibat dalam kekerasan di Punjab dengan menyediakan kamp-kamp latihan untuk para teroris Sikh dan mensuplai persenjataan mereka.⁹ Sehubungan dengan itu Pakistan juga dituduh terlibat dalam usaha pembunuhan PM Rajiv Gandhi pada tanggal 2 Oktober 1986.¹⁰ Sebaliknya pihak Pakistan menuduh India telah memberikan bantuan kepada Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin oleh Benazir Bhutto dalam upaya menggulingkan pemerintah resmi Pakistan.¹¹

Seperti halnya hubungan antara India dan Pakistan, hubungan India-Sri Lanka juga dihantui kecurigaan-kecurigaan satu pihak terhadap pihak lain. Di samping curiga terhadap Pakistan yang menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan, India juga curiga dan merasa "cemas" atas pembangunan militer Sri Lanka yang banyak mendapat bantuan dari negara-negara lain khususnya dari Israel, Inggris dan Pakistan. Sebaliknya Sri Lanka yang sedang dilanda krisis etnik itu menuduh India membantu Suku Tamil dengan mengizinkan wilayahnya dijadikan basis mereka untuk melawan Pemerintah Kolombo.

Untuk mengatasi masalah ini PM Rajiv Gandhi pernah mengatakan bahwa ia memberi jaminan kepada Pemerintah Kolombo tidak akan mengizinkan gerilyawan Tamil menggunakan India sebagai basis mereka dan mengusahakan penengahan antara Pemerintah Sri Lanka dan Kelompok Tamil itu.¹² Untuk itu kedua pemerintah telah beberapa kali mengadakan pertemuan. Yang terakhir pertemuan antara PM Rajiv Gandhi dan PM Jayewardene diadakan di Bangalore bersamaan dengan KTT SAARC. Itikad baik India ditunjukkan pula dengan menahan lebih dari 100 gerilyawan Tamil di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan. Di antara yang ditahan adalah pemimpin kelompok

⁷*Suara Karya*, 22 Maret 1986.

⁸*Kompas*, 1 Maret 1986.

⁹*Sinar Harapan*, 3 April 1986.

¹⁰*Kompas*, 9 Oktober 1986.

¹¹*Antara*, 28 Agustus 1986.

¹²*Far Eastern Economic Review*, 2 Januari 1986, hal. 29.

terbesar Tamil, Velupillai Prabhakaran, dan penasihat politik Anton Balasinghan.¹³

Bagi India peran penengah ini sangat penting. Sebagai penengah ia tidak memihak. India tidak ingin hubungannya dengan Sri Lanka menjadi buruk dan tidak ingin melihat negara bagian Tamil Nadu menentangnya. Negara bagian ini merupakan asset yang cukup berarti bagi Partai Kongres. Dari sekitar 500 anggota parlemen, Tamil Nadu menguasai 129 kursi. Oleh karena itu apa yang diusulkan oleh Rajiv diusahakan agar tidak berat sebelah. Ia mendesak Sri Lanka untuk memberikan hak otonomi yang lebih besar pada golongan minoritas Tamil di Propinsi Utara dan Timur, tetapi tidak mendukung tuntutan Kelompok Tamil untuk memisahkan diri.

Meskipun demikian India merasa resah dengan tindakan Sri Lanka meminta bantuan dari Pakistan, yang berupa persenjataan, pelatih dan penasihat militer. Hal ini pernah ditegaskan oleh Presiden Zia-Ul Haq ketika berkunjung ke Sri Lanka bulan Januari 1986. Campur tangan Pakistan ini dianggap bisa memperburuk situasi hubungan ketiga negara itu.

Berbeda dengan hubungan India-Sri Lanka yang diwarnai oleh masalah etnik, hubungan Bangladesh-India lebih banyak diwarnai oleh persoalan-persoalan bilateral seperti pemanfaatan air Sungai Gangga, masalah perbatasan dan narkotika. Pertemuan antara Presiden Ershad dan PM Rajiv Gandhi di Bahamas bulan Oktober 1985 merupakan salah satu usaha konkret kedua negara dalam meningkatkan hubungan kedua negara dan menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat. Dalam pertemuan itu Bangladesh memperoleh jaminan dari India untuk membagi air Sungai Gangga selama musim panas. Sementara itu masalah narkotika yang juga terjadi antara India dan Pakistan telah disepakati untuk dibahas dalam KTT SAARC.

Faktor psikologis yang terus menghantui hubungan antara India dan Pakistan atau India dan Sri Lanka, rupanya tidak terjadi dalam hubungan antara Pakistan dan Afghanistan. Meskipun demikian hubungan antara kedua negara ini jauh dari normal. Sejak partai komunis menguasai negeri itu (April 1978), dan pasukan Soviet hadir di sana, hubungan Pakistan dengan Afghanistan menjadi sangat buruk. Pergolakan yang terjadi di dalam negeri Afghanistan mengakibatkan mengalirnya ribuan pengungsi ke wilayah-wilayah Pakistan. Dan karena kehadiran pasukan Soviet semakin merasa terancam keamanannya.

Untuk mengatasi masalah pengungsi yang terus meningkat itu Pakistan mengusulkan diadakannya suatu perundingan. Tetapi karena Pakistan tidak mengakui rezim Kabul, Menteri Luar Negeri Pakistan waktu itu, Agha Shahi, mendesak agar PBB memprakarsai suatu perundingan tidak langsung (*prox-*

¹³*Prioritas*, 10 November 1986.

imity talks). Melalui beberapa pendekatan akhirnya perundingan tidak langsung babak pertama diselenggarakan di Jenewa bulan Juni 1982 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Pakistan, Afghanistan dan PBB. Agenda pembicaraan termasuk penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan dan repatriasi pengungsi Afghanistan.

Sampai perundingan babak kelima yang diselenggarakan di tempat yang sama pada tanggal 27-30 Agustus 1985, pembicaraan hanya berkisar pada masalah jaminan internasional untuk tidak melakukan intervensi dan campurtangan di Afghanistan, dan masalah repatriasi pengungsi. Sementara itu masalah penarikan pasukan Soviet baru pertama kali dibicarakan pada babak keenam (Mei 1986). Hal ini disebabkan oleh keengganan pihak Soviet untuk menarik pasukannya. Tetapi setelah Gorbachev memegang tampuk pimpinan Kremlin, tuntutan Pakistan itu mulai diperhatikan dan dipelajari. Beberapa waktu sebelum pertemuan babak keenam itu, Moskow memutuskan akan menarik enam resimen pasukannya dari Afghanistan dan tidak akan menggantikannya dengan pasukan baru. Penarikan ini secara tuntas diselesaikan akhir Oktober 1986. Meskipun hanya 7% dari jumlah keseluruhan pasukan Soviet di Afghanistan, penarikan itu dianggap merupakan langkah positif menuju suatu penyelesaian menyeluruh.

HUBUNGAN DENGAN NEGARA ADIKUASA

Kawasan Asia Selatan ikut andil dalam peningkatan perlombaan senjata tidak saja persenjataan konvensional, tetapi juga persenjataan nuklir. Karena AS dan Uni Soviet hingga kini masih merupakan dua negara terbesar dalam suplai persenjataan di kawasan ini, maka mereka pun ikut andil dalam mewarnai hubungan antar-negara-negara di kawasan. Peningkatan hubungan antara Pakistan atau Sri Lanka dan AS selalu diikuti dengan perasaan was-was dan khawatir oleh India. Demikian pula sebaliknya, peningkatan hubungan antara India dan Uni Soviet mendapat tanggapan yang serupa dari Pakistan dan Sri Lanka. Hal itu disebabkan oleh adanya faktor-faktor psikologis seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Sebenarnya, sejak berkuasanya Rajiv Gandhi, India berusaha menjalin hubungan yang lebih seimbang dengan kedua negara superpower tersebut. Meskipun India tetap ingin meneruskan perjanjian perdamaian dan persahabatan dengan Uni Soviet yang ditandatangani tahun 1971 dan berlaku untuk masa 20 tahun, Rajiv juga berusaha meningkatkan hubungan dengan Washington, seperti yang telah dirintis oleh mendiang ibunya. Tetapi dari sikap Rajiv selama ini tampak bahwa dia lebih condong ke Moskow.

Beberapa bulan setelah terpilih menjadi Perdana Menteri India (Desember 1984), Rajiv sudah berkunjung ke Uni Soviet (Maret 1985) untuk menghadiri

penguburan Konstantin Chernenko. Kemudian untuk kedua kalinya ia berada di negara beruang pada kunjungan resminya bulan Mei 1985. Dalam kunjungannya itu ia menyatakan bahwa India mendukung posisi strategi Soviet dan sependapat dengan pandangan negara itu tentang perkembangan dunia. Kunjungannya itu menghasilkan kesepakatan bantuan Soviet sebesar US\$1,3 milyar untuk membiayai proyek-proyek kerjasama kedua negara. Untuk lebih meningkatkan hubungan militer Rajiv kemudian mengirimkan Menteri Pertahanan P.V. Narasimha Rao ke Moskow guna membicarakan bantuan perlengkapan militer modern dan alih teknologi sistem persenjataan Soviet.¹⁴

Kunjungannya ke Uni Soviet itu telah diimbangi dengan kunjungannya ke AS beberapa bulan kemudian untuk mendapatkan teknologi tinggi yang tidak didapat dari Uni Soviet. Kunjungannya itu dibalas dengan kunjungan Menteri Pertahanan AS, Caspar Weinberger, pada bulan Oktober 1986. Meskipun beberapa teknologi komputer diperkirakan akan diperoleh India, pada dasarnya AS masih enggan menjual teknologi tingginya kepada India karena takut akan bisa sampai ke tangan Soviet.

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa India tampaknya lebih puas berhubungan dengan Uni Soviet, terutama setelah kunjungan balasan Gorbachev akhir bulan November 1986. Memang, selama ini India merasa khawatir akan peningkatan hubungan AS dengan Pakistan. Sejak invasi pasukan Soviet ke Afghanistan, AS memperbesar bantuannya. Pada tahun 1982 bantuan itu sudah senilai US\$1,2 milyar. Saat ini AS sudah menjual pesawat tempur termodernnya, F-16, kepada Pakistan dan tahun 1987 negara itu akan mendapatkan AWACS. Di samping itu AS juga membantu pengembangan teknologi nuklir Pakistan. Diperkirakan negara ini sudah memiliki kemampuan untuk membuat senjata nuklirnya sendiri.

Sehubungan dengan hal ini, Gorbachev dalam kunjungannya ke India telah menawarkan persenjataan canggih untuk mengimbangi apa yang telah dimiliki Pakistan itu. Dalam kesepakatan yang dihasilkan, Uni Soviet bersedia memberikan 40 Mig-29 dan berjanji akan membantu India dalam sistem radar untuk mengimbangi AWACS-nya Pakistan.

Dengan bantuan persenjataan dari kedua negara adikuasa itu tampaknya baik Pakistan, yang 95% persenjataannya diperoleh dari AS, maupun India, yang 75% persenjataannya diperoleh dari Uni Soviet, akan terus berusaha saling menandingi, karena satu pihak selalu merasa terancam oleh pihak lain. Hal ini dipanaskan oleh kehadiran AS dan Uni Soviet yang masing-masing mempunyai kepentingan. Selama persepsi keamanan kedua negara adikuasa itu tidak berubah, selama itu pula perlombaan persenjataan di kawasan itu terus berlangsung.

¹⁴Asia 1986 Yearbook, Far Eastern Economic Review, hal. 151.